

# E-GOVERNMENT PADA PEKON TANJUNG HERAN KECAMATAN PUGUNG KABUPATEN TANGGAMUS

Agung Pratama

Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung

Jl. Wisma Rini No. 09 Pringsewu Lampung

Telp. (0729) 22240 website: [www.stmikpringsewu.ac.id](http://www.stmikpringsewu.ac.id)

E-mail : [AgungPratama899@yahoo.co.id](mailto:AgungPratama899@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat cepat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan salah satunya dengan membuat e-government yang dapat dijadikan tempat antara berkomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak lain. Salah satu bentuk media untuk menyampaikan seluruh informasi tentang Pekon. E-government pada Pekon Tanjung Heran merupakan salah satu media yang berbentuk website yang dibuat untuk menyampaikan informasi tentang keseluruhan mengenai Pekon Tanjung Heran yaitu potensi Pekon Tanjung Heran, dan kegiatan Pekon Tanjung Heran. Saat ini masyarakat Pekon Tanjung dalam mendapat informasi masih kesulitan sehingga perlu dibuatnya e-government pada Pekon Tanjung Heran. Dengan dibuatnya sistem ini di harapkan dapat mengatasi kesulitan masyarakat saat ini. Metode yang digunakan metode Waterfall. Masyarakat Proses pembuatan E-government pada Pekon Tanjung Heran ini dilakukan dengan menganalisis sistem yang telah ada pada Pekon Tanjung Heran, kemudian pembuatan beberapa diagram yaitu, diagram konteks, DFD (data flow diagram), ERD (Diagram Relasi Entitas) dan DAD (Diagram Arus Data). Dilanjutkan dengan mendesain web dan teknik pemrograman terstruktur yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. E-government pada Pekon Tanjung Heran ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada Pekon Tanjung Heran baik dalam hal penyampaian informasi dan pelayanan pada masyarakat.

Kata kunci : E-government, komunikasi, informasi, website.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Elektronic Government atau E-Gov merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dari New Public Management (NPM). Definisi dari elektronik e\_Government (e\_Gov) itu sendiri adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. (Iskandar dalam jurnal Iis Hidayati, 2011)

Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-Government ini. Penyampaian pelayanan kepada publik di dalam paradigma e-Government tidak lagi dilakukan melalui dokumen-dokumen dan interaksi personal melainkan sudah dilakukan melalui

elektronik sehingga tidak ada lagi interaksi personal di dalam pemberian pelayanan. Orientasi efisiensi biaya produksi di dalam pemberian pelayanan pun telah bergeser kepada orientasi yang menekankan kepada fleksibilitas, pengawasan, dan kepuasan pengguna (customer) yang merupakan prinsip dari new public management (NPM).

E-Government, yang dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif (Prasojo, et.al., 2010:82), yaitu:

- (a) Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi;
- (b) Ruang cyber dalam pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit-belit; dan
- (c) E-Government dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal

Pekon Gemahriyah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung adalah contoh Pekon yang sudah menggunakan sistem informasi

berbasis web untuk memberikan berbagai informasi seperti potensi daerah, program Pekon, serta kegiatan-kegiatan yang ada di Pekon Gemahripah kepada masyarakat luas tanpa batas, karena sistem informasi berbasis web merupakan sistem informasi yang mampu berjalan secara terbatas dan dapat di akses oleh siapa saja dan kapan saja. Selain itu, Pekon Gemahripah juga dapat meng update informasi yang ingin ditampilkan pada website jika terhubung dengan Internet. Dengan begitu Pekon Gemahripah dapat bertukar informasi bahkan bekerja sama dengan Pekon lainnya sehingga Pekon Gemahripah dapat berkembang. Masih banyaknya Pekon yang belum bisa memanfaatkan kemajuan sistem informasi membuat Pekon tersebut kurang maju, hal ini disebabkan ruang lingkup dalam penyebaran informasi yang terbatas atau manual.

Mengingat betapa pentingnya informasi bagi berkembangnya suatu Pekon maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rencana bangun pembuatan sistem informasi Pekon pada Pekon Tanjung Heran yang berbasis web dengan tujuan agar aparat Pekon Tanjung Heran dan masyarakatnya dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat sehingga orang yang ingin mendapatkan informasi tentang Pekon Tanjung Heran dapat mengaksesnya melalui internet.

### 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dibuatlah rumusan masalah “Bagaimana membuat sistem e-government pada Pekon Tanjung Heran?”

### 1.3. Batasan Masalah

Ruang Lingkup Subjek Penelitian Penelitian dilakukan pada Pekon Tanjung Heran Subjek ini dipilih karena sesuai dengan tema yang di ambil dan Pekon ini sedang berkembang serta memiliki banyak potensi sehingga Pekon Tanjung Heran perlu di promosikan.

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata 1 pada Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer (STMIK) Pringsewu.
- b. Membuat sistem informasi Pekon berbasis web pada Pekon Tanjung Heran.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama menuntut ilmu di kampus STMIK Pringsewu.

- b. Di harapkan dapat memberikan kemudahan kepada aparat Pekon Tanjung Heran dan masyarakatnya untuk memberikan informasi tentang Pekon Tanjung Heran kepada masyarakat luas.
- c. Tidak terbatasnya area informasi sehingga penyampaian informasi tidak hanya meliputi Pekon Tanjung Heran dan sekitarnya.
- d. Tidak terbatasnya aksesibilitas sehingga penyampaian informasi lebih luas dan informasi dapat di akses juga oleh masyarakat yang berada jauh dari Pekon Tanjung Heran.

## 2. LANDASAN TEORI

Dengan memperhatikan permasalahan, tujuan dan kegiatan dari penelitian ini maka judul yang di ambil dalam penelitian ini adalah “E-GOVERNMENT PADA PEKON TANJUNG HERAN”.

Adapun definisi dari judul ini sebagai berikut :

### 2.1. Definisi Internet

Internet adalah sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia mulai dari sebuah PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet ini. Nsfnet, Nearnnet, Suranet, dan lain-lain. (Menurut Johsen dalam jurnal Nandari, 2012)

### 2.2. Definisi Website

Website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah brows.

### 2.3. Definisi E-Government

E-Government mempunyai arti bahwa seluruh proses yang dikerjakan pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang intensif”.

*E-government*, yang dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif (Prasojo, *et.al.*, 2011: 82), telah menjadi bagian penting dalam

usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pentingnya *e-government* paling tidak disebabkan oleh 3(tiga) faktor (Prasojo, *et.al.*, 2013: 82), yaitu:

- a. Komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi;
- b. Ruang *cyber* dalam pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik dari pelayanan yang berbelit-belit; dan
- c. *E-government* dapat menawarkan juga informasi di tingkat lokal.

Dasar hukum *e-government* di Indonesia di tingkat nasional adalah Intruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Poin penting Inpres tersebut yaitu menginstruksikan kepada: (1) Menteri; (2) Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; (4) Panglima Tentara Nasional Indonesia; (5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6) Jaksa Agung Republik Indonesia; (7) Gubernur; dan (8) Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Di samping itu, Inpres tersebut juga meminta seluruh pihak seperti disebutkan di atas untuk merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Regulasi lainnya di tingkat nasional selain Inpres adalah Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan *E-government* di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Hanya saja, Peraturan Presiden tersebut masih berstatus sebagai *draft* dan belum disetujui oleh Presiden. Kembali kepada Inpres No.3 Tahun 2003, sejak Inpres itu diberlakukan, lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota mulai melakukan banyak persiapan agar dapat melaksanakan Inpres tersebut. Sebagai contoh, jika menggunakan indikator dari salah satu bentuk pelaksanaan *e-government* yakni *e-procurement*, berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai tahun 2010, minat dan implementasi kebijakan *e-procurement* di tingkat nasional telah 25 instansi pemerintah di tingkat pusat. Sedangkan, untuk tingkat daerah sampai bulan Januari 2010, jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk kategori telah menerapkan *e-procurement* telah mencapai 30 provinsi, 72 kabupaten, dan 34 kota (LKPP, 2010).

Secara teoretis, *e-government* karena beberapa sebab (OECD 2005, 15-16), yakni:

1. *E-government* meningkatkan efisiensi Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dalam hal pemrosesan tugas dan operasi administrasi publik dalam jumlah besar. Aplikasi berbasis internet bisa menyimpan koleksi dan transmisi data, provisi informasi dan komunikasi dengan *customer*. Efisiensi di masa datang yang lebih signifikan mungkin dilakukan melalui pembagian data yang lebih besar dengan dan antar pemerintahan.
2. *E-government* meningkatkan pelayanan Jika pemerintahan ingin fokus pada pengguna mengimplikasikan bahwa seorang pengguna tidak seharusnya mengerti struktur dan hubungan pemerintahan yang kompleks dengan tujuan berinteraksi dengan pemerintah. Internet bisa membantu untuk mencapai tujuan ini dengan memudahkan pemerintah untuk muncul sebagai organisasi yang bersatu dan menyediakan pelayanan online. Pelayanan *e-government* harus dibangun dalam kaitan dengan permintaan dan nilai untuk *user*, sebagai bagian dari strategi pelayanan yang melibatkan banyak saluran.
3. *E-government* membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu Internet bisa membantu pemangku kepentingan (*stakeholder*) membagi informasi dan ide dan maka itu berkontribusi terhadap keluaran kebijakan tertentu. Sebagai contoh, informasi *online* bisa menyebarluaskan penggunaan sebuah program pendidikan atau pelatihan, pembagian informasi dalam sektor kesehatan bisa meningkatkan penggunaan sumber daya dan perhatian terhadap pasien, dan pembagian informasi antara pemerintahan pusat dan sub-nasional bisa memfasilitasi kebijakan lingkungan.
4. *E-government* bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi *E-government* membantu mengurangi korupsi, menambah keterbukaan dan kepercayaan dalam pemerintahan, dan maka berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi. Dampak khusus mencakup pengeluaran pemerintahan yang berkurang melalui program yang lebih efektif, dan efisiensi dan peningkatan dalam produktivitas bisnis melalui teknologi komunikasi dan informasi memudahkan penyederhanaan administrasi dan meningkatkan informasi pemerintahan.
5. *E-government* bisa menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi Teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung reformasi dalam banyak area, sebagai contoh dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi

pembagian informasi dan meng-highlight ketidakkonsistenan internal.

*E-government* bisa membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara adalah hal mendasar untuk pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dan komunikasi membantu membangun kepercayaan dengan memudahkan pelibatan warga negara dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah-an yang terbuka dan akuntabel dan membantu mencegah korupsi. Lebih lanjut, jika keterbatasan dan tantangan dapat diatasi, *e-government* bisa membantu suara seorang individu dapat didengarkan dalam sebuah perdebatan yang lebih luas.

#### 2.4. Definisi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (Menurut Soebagio dalam Jurnal Fani Wulandari, 2011)

#### 2.5. Definisi Pekon Tanjung Heran

Tanjung Heran merupakan bagian dari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang berada di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Talang padang, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus. Pekon Tanjung Heran didirikan pada tahun 1939 dengan luas  $\pm 5$  Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar  $\pm 6.249$  orang yang terdiri dari 1.617 KK. Pekon Tanjung Heran terdiri dari 8 Dusun terbagi menjadi 8 RT.

#### 2.6. Definisi E-Government pada Pekon Tanjung Heran

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat mendefinisikan E-Government pada Pekon Tanjung Heran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengolahan data pada Pekon Tanjung Heran dalam penyajian informasi yang dihasilkan tersebut ditampilkan di sebuah halaman Website sehingga informasi tersebut dapat dipublikasikan dengan mudah dan dapat diakses oleh masyarakat Pekon Tanjung Heran dan masyarakat pada umumnya.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Waterfall

Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan pemodelan

perangkat lunak dengan metode *waterfall*, yang meliputi beberapa proses diantaranya:

- a. *Requirements Analysis Definition.*  
Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun.
- b. *System and Software Design*  
Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap.
- c. *Implementation And Unit Testing*  
Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji secara unit.
- d. *Integration and System Testing*  
Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (sistem testing).
- e. *Operation and Maintenance*  
Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya.

#### 3.2. Profil Pekon Tanjung Heran

Pekon Tanjung Heran merupakan bagian dari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang berada di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Talang padang, Kecamatan Paagelaran Kabupaten Tanggamus. Pekon Tanjung Heran didirikan pada tahun 1939 dengan luas  $\pm 5$  Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar  $\pm 6.249$  orang yang terdiri dari 1.617 KK. Pekon Tanjung Heran terdiri dari 8 Dusun terbagi menjadi 8 RT.

#### 3.3. Letak Geografis

##### 3.3.1. Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas wilayah Pekon Tanjung Heran i seluruhnya  $\pm 5$  Km<sup>2</sup>.
- b. Batas Wilayah  
Letak geografi Pekon Pugung terletak diantara:
  1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tangkit serdang.
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Banjar agung.
  3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sumanda.
  4. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Suka merindu.
- c. Iklim  
Pekon Tanjung Heran terletak pada ketinggian tempat 1000 dpl dan suhu rata-

rata harian 30 C, dan curah hujan 2000 s/d 3000 mm.

### 3.3.2. Fotografi

Wilayah Pekon Heran terletak di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung dengan jumlah penduduk ± 6.249 Orang yang terdiri dari 1.617 KK. Serta luas wilayah ± 5 Km<sup>2</sup>. Yang terdiri atas 8 (delapan) dusun yaitu: Dusun Tanjung Heran dan Dusun Tanjung sari, Tanjung Ratu, Tanjung Agung, Marabung, Marabung 1, Marabung 2, Marabung 3. Penduduk Pekon Tanjung Heran sebagian besar adalah suku Jawa dan mayoritas beragama Islam.

#### JUMLAH

1. Jumlah total = 6.249 orang
2. Jumlah Laki-laki = 3.222 orang
3. Jumlah Perempuan = 3.027 orang
4. Jumlah Kepala Keluarga = 1.617 orang

Tabel 1. Jumlah Penduduk

UMUR	JUMLAH	UMUR	JUMLAH
0-12 bulan	133 orang	30 tahun	78 orang
1 tahun	90 orang	31 tahun	75 orang
2 tahun	80 orang	32 tahun	81 orang
3 tahun	74 orang	33 tahun	78 orang
4 tahun	70 orang	34 tahun	67 orang
5 tahun	74 orang	35 tahun	89 orang
6 tahun	124 orang	36 tahun	78 orang
7 tahun	120 orang	37 tahun	64 orang
8 tahun	129 orang	38 tahun	82 orang
9 tahun	134 orang	39 tahun	78 orang
10 tahun	115 orang	40 tahun	88 orang
11 tahun	123 orang	41 tahun	78 orang
12 tahun	125 orang	42 tahun	67 orang
13 tahun	159 orang	43 tahun	89 orang
14 tahun	156 orang	44 tahun	78 orang
15 tahun	151 orang	45 tahun	77 orang
16 tahun	163 orang	46 tahun	88 orang
17 tahun	142 orang	47 tahun	76 orang
18 tahun	152 orang	48 tahun	72 orang
19 tahun	129 orang	49 tahun	77 orang
20 tahun	130 orang	50 tahun	78 orang
21 tahun	128 orang	51 tahun	80 orang
22 tahun	129 orang	52 tahun	77 orang
23 tahun	111 orang	53 tahun	66 orang
24 tahun	147 orang	54 tahun	90 orang
25 tahun	99 orang	55 tahun	76 orang
26 tahun	169 orang	56 tahun	55 orang
27 tahun	80 orang	57 tahun	65 orang
28 tahun	76 orang	58 tahun	86 orang
29 tahun	79 orang	Lebih dari	54 orang

		59	
TOTAL	.....orang	TOTAL	6.249 orang

### 3.3.3. Sarana Dan Prasarana

#### ✚ Mata pencaharian pokok

- a. Petani
- b. Buruh tani
- c. Buruh/ swasta
- d. Pegawai negeri
- e. Pedagang

#### ✚ Agama

- a. Islam
- b. Katolik
- c. Kristen

#### ✚ Etnis

- a. Jawa
- b. Lampung
- c. Batak

#### ✚ Sarana Peribadatan

- a. Jumlah Masjid : 1 buah
- b. Jumlah Musholah : 2 buah

#### ✚ Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri : 1 buah
- b. SLTP : -
- c. SMK : 1 buah
- d. Taman kanak-kanak : 2 buah

#### ✚ Sarana Olah Raga

- a. Lap. Sepak bola : 3 buah
- b. Lap. Bola Volly : 1 buah

#### ✚ Perekonomian

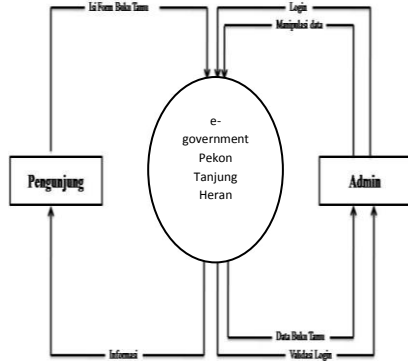
- a. Fasilitas perdagangan
  1. Toko : 10 buah
  2. Warung : 100 buah
- b. Pabrik
  - Pabrik penggilingan padi : 5 buah
- c. Sektor jasa
  1. Bengkel motor : 15 buah
  2. Service elektronik : 4 buah
- d. Lahan Pertanian
 

Lahan pertanian yang ada di Pekon Tanjung Heran adalah 30% dari luas Pekon Tanjung Heran atau sekitar 120 Ha. Sedangkan selebihnya adalah lahan kering (daratan) atau pemukiman penduduk.

## 4. Perancangan Dan Implementasi

### 4.1 Diagram Konteks

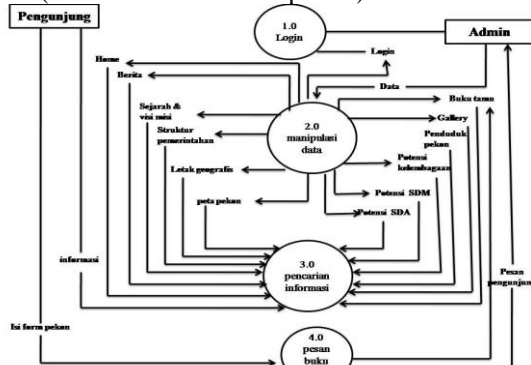
Diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan suatu sistem beserta seluruh eksternal entity yang terlibat dalam sistem yang disertai dengan aliran data yang digunakan atau diperlukan (hanya terlibat satu proses).



Gambar 4.1. Diagram Konteks

### 4.2 DFD level 0

DFD level 0 (Diagram Flow Diagram level 0) merupakan diagram yang menggambarkan seluruh proses yang ada di *diagram konteks*, seluruh *aksternal entity* dan seluruh proses yang ada dalam sistem (terlibat lebih dari satu proses).



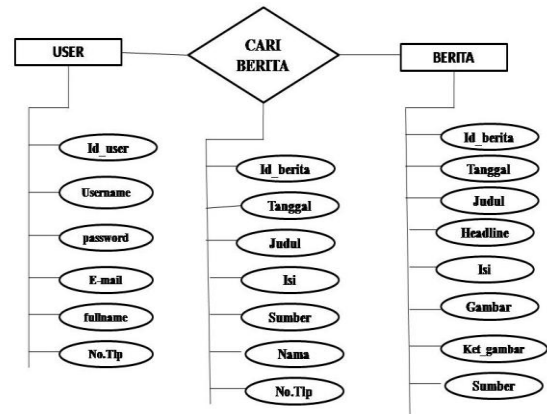
Gambar 4.2. DFD level 0

### 4.3 DFD level 1

DFD Level 1 (Diagram Flow Diagram level 1) merupakan diagram yang menunjukkan penjelasan masing-masing proses yang terdapat pada *Diagram Level 0*.

### 4.4. ERD

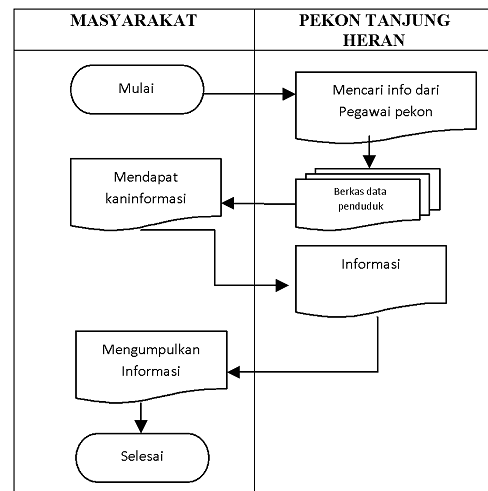
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengorganisasikan data yang dikumpulkan dimana dalam diagram ini dapat memperlihatkan *entitas-entitas* beserta hubungan entitas tersebut.



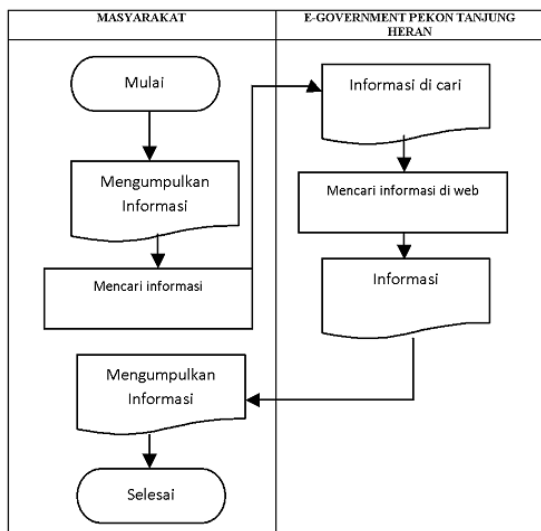
Gambar 4.4 ERD

### 4.5. Analisis Sistem Yang sedang Berjalan

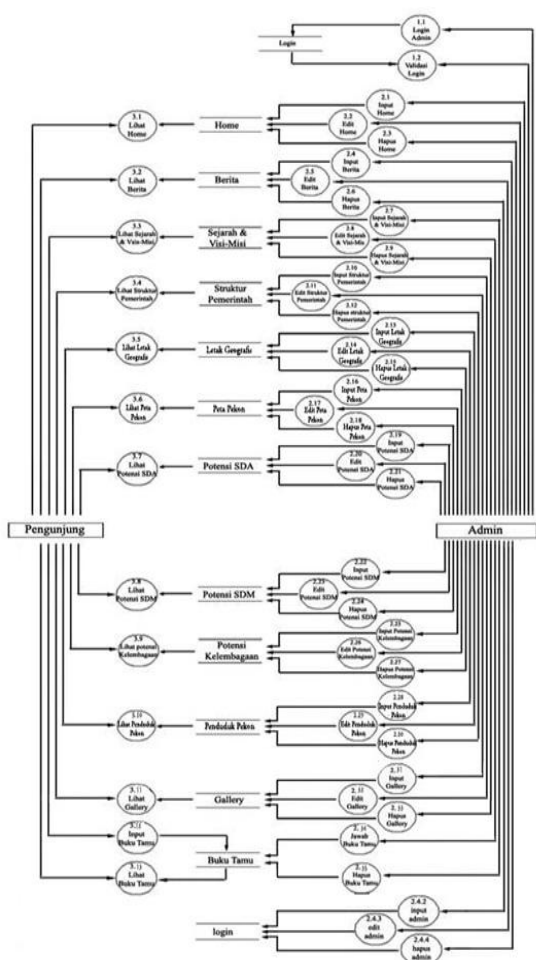
Dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa pengolahan data dan informasi saat ini yang ada di Pekon Tanjung Heran masih menggunakan sistem manual. Untuk itu perlu adanya penyajian data dan informasi di Pekon Tanjung Heran dengan sistem yang baru yang berbasis Web. Adapun DAD (Diagram Alir Data) dari sistem yang diajukan adalah sebagai berikut:



4.6. Sistem yang diusulkan



Gambar 4.5 Analisis Sistem Diusulkan



Penjabaran dari DAD E-government pada

Pekon Tanjung Heran diatas adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mengumpulkan informasi yang akan dicari.

2. Proses pencarian informasi, masyarakat mengunjungi / membuka Website E-government pada Pekon Tanjung Heran.
3. Informasi Pekon Tanjung Heran didapatkan oleh Masyarakat yang membutuhkan.

#### 4.7. Implementasi

##### 4.7.1. Implementasi Halaman Home

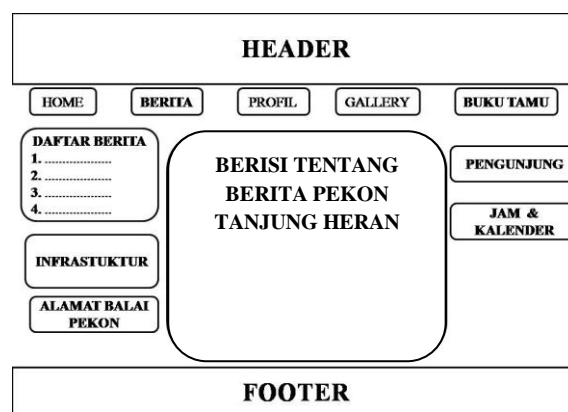
Halaman menu home berisi tentang halaman depan dan sambutan dari kepala Pekon Tanjung Heran. Rancangan halaman menu home dalam E-Government pada Pekon Tanjung Heran dapat dilihat di bawah ini:



##### 4.6.1. Implementasi Halaman Home

##### 4.7.2. Implementasi Halaman Berita

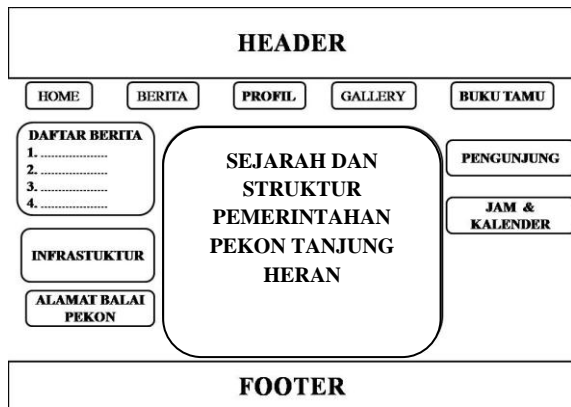
Halaman menu berita berisi tentang berita-berita terbaru khususnya di Pekon Tanjung Heran Rancangan menu berita dalam E-Government pada Pekon Tanjung Heran dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.6.2. Implementasi Halaman Berita

##### 4.6.3 Implementasi Halaman Profil

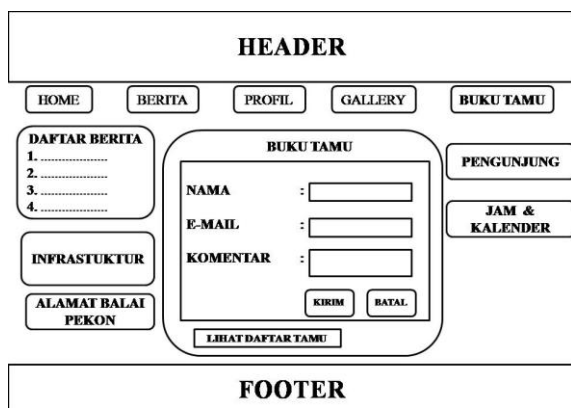
Halaman profil berisi tentang sejarah singkat terbentuknya pekon Tanjung Heran, struktur pemerintahan, dan letak geografis Pekon Tanjung Heran. Rancangan menu profil dalam E-Government pada Pekon Tanjung Heran.



Gambar 4.6.3 Implementasi Halaman Profil

#### 4.6.5 Implementasi Halaman Buku Tamu

Halaman menu buku tamu berisi tentang komentar pengunjung. Rancangan tampilan halaman menu buku tamu dalam E-Government pada Pekon Tanjung Heran dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 4.6.4 Implementasi Halaman Buku Tamu

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Setelah terciptanya sistem baru E-government pada pekon Tanjung Heran yaitu sistem yang memberikan informasi tentang Pekon Tanjung Heran, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berbagai permasalahan mengenai terbatasnya informasi dan belum memiliki akses yang cukup luas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem e-government Pekon Tanjung heran menggunakan Metode Waterfall guna memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat desa.
2. Sistem informasinya sudah memiliki akses yang cukup luas, sehingga dalam penyampaian informasinya tidak terbatas dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke Pekon Tanjung Heran.

3. Dengan adanya E-Government pada Pekon Tanjung Heran, dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Pekon Tanjung Heran terhadap masyarakat setempat dan masyarakat luas pada umumnya.

### 5.2. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Perlunya operator khusus yang bertugas untuk menangani pengoperasian komputer, khususnya program internet dan dapat memahami tentang sistem informasi E-governmnt berbasis web.
2. Perlunya disediakan ruang khusus yang nyaman untuk admin yang akan digunakan dalam pengoperasian.
3. Agar keamanan sistem lebih terjamin maka perlu penggunaan pasword dan pergantian pasword secara berkala agar sistem ini tidak mudah dirusak oleh orang lain.
4. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar sistem yang telah dibangun bermanfaat sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem ini.
5. Perlunya digunakan akses melalui berbagai macam bentuk media komunikasi seperti PC, Tablet, dan Handpone dalam merancang atau mendesain website dan untuk memudahkan para pengguna dalam mencari informasi dimanapun dan kapanpun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar dalam jurnal Iis Hidayati. 2011. Pengertian E-Government.
- Prasojo. 2010. Pengertian E-Government
- Johsen dalam jurnal Nandari. 2012. Definisi Internet.
- Prasojo. 2011. E-Governmen pada Kelurahan Pacitan.
- Soebagio dalam Jurnal Fani Wulandari. 2011. Sistem E-Government pada Pemerintahan Desa.